



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2026**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231.a);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 339, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 339.a);

19. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 334);
20. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 499) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 574);
21. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 791);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
15. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
16. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya yang disebut BUMDesa; dan
17. Penghasilan Tetap, yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan Tetap yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya yang merupakan pendapatan atau gaji yang dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa, untuk membiayai program kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini:
 - a. memberikan dasar dan kepastian bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan pagu APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 - b. memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam APBDesa sesuai dengan RPJM Desa dan RKP Desa, berdasarkan pagu ADD yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026; dan
 - c. mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pemanfaatan ADD secara efektif, partisipatif, dan berbasis potensi Desa dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.

BAB II TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN ADD

Bagian Kesatu ADD Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian pagu ADD yang dianggarkan bagi Pemerintah Desa diwilayah Gunung Mas pada APBD Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 72.036.693.800,- (Tujuh Puluh Dua Miliar Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. sebesar Rp 63.237.800.000,- (Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan
 - b. sebesar Rp 8.798.893.800,- (Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran

berjalan sebagai Insentif ADD yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik;

- (3) Jumlah Desa penerima Pembagian ADD Tahun Anggaran 2026 sebanyak 114 (seratus empat belas) desa diwilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Rincian pagu ADD Formula tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (5) Rincian pagu Insentif ADD tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pembagian pagu ADD untuk setiap Desa dilakukan:

- a. secara merata untuk seluruh Desa, yakni ADD Formula Minimal (ADDFM= Siltap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa + tunjangan BPD);
- b. secara proporsional per Desa (ADDP = dari total pagu ADD) x Bobot Desa yang bersangkutan); dan
- c. berdasarkan kinerja terbaik.

Pasal 5

- (1) Besaran pembagian ADD Formula per desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

ADDM = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa + Tunjangan BPD

ADDP = $BD_x \times X (\sum ADD - \sum ADDM)$

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total ADD untuk Daerah

\sum ADDM : Jumlah Keseluruhan ADD Minimal,

- (2) Nilai Bobot Desa (BDx) pada rumus penghitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan menggunakan beberapa indikator variabel independen.
- (3) Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. indeks kesulitan geografis; dan
 - d. jumlah penduduk miskin.
- (4) Data Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan koefisien dan bobot sebagai berikut:

Huruf	Variabel	Kode Variabel	Bobot
a	Jumlah Penduduk	V1	0,2
b	Luas Wilayah	V2	0,2
c	Indeks Kesulitan Geografis	V3	0,2
d	Jumlah Penduduk Miskin	V4	0,3

- (5) Data Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas.
- (6) Indikator variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempengaruhi nilai Bobot Desa (BDx) dalam penerimaan ADD per Desa.

Pasal 6

- (1) Besaran jumlah ADD yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD; dan
 - b. jumlah penduduk, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis dan jumlah penduduk miskin, yang merupakan indikator variabel independen serta digunakan untuk menghitung pembagian ADD per Desa.
- (2) Besaran jumlah ADD yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dengan mempertimbangkan:
 - a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria kinerja.

Pasal 7

- (1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut:
 - a. percontohan desa anti korupsi mendapatkan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Desa yang memiliki BUMDesa berbadan hukum dan aktif memperoleh tambahan alokasi sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - c. Desa yang telah memiliki BUMDesa dengan unit usaha yang sudah berjalan memperoleh tambahan alokasi sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - d. Pemerintah Desa yang telah menyalurkan dana Ketahanan Pangan ke BUMDesa Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - e. Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih yang berbadan hukum memperoleh tambahan alokasi sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - f. Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih yang aktif memperoleh tambahan alokasi sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah); dan
 - g. tiap Desa dengan status desa mandiri berdasarkan indeks desa membangun tahun berjalan mendapatkan sebesar Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

- (2) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan kriteria Desa dengan indikator:
 - a. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan realisasi semester I tahun anggaran 2025;
 - b. ketepatan waktu dalam penyaluran ADD tahun 2025;
 - c. ketepatan waktu dalam penyaluran dana desa tahun 2025;
 - d. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bantuan langsung tunai desa tahun 2025; dan
 - e. ketepatan Waktu dalam Posting APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2025.
 - f. Desa yang telah mengisi survey aset untuk lahan Koperasi Desa Merah Putih paling lambat 01 Desember 2025;
- (3) Tiap desa dengan Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan:
 - a. desa dengan nilai skor 6 (enam) dan 5 (lima) sangat baik mendapatkan sebesar Rp 197.778.760,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah); dan
 - b. Desa dengan nilai skor 4 (empat) baik mendapatkan sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 8

Rumusan rincian perhitungan ADD yang diterima per desa sebagai berikut :

ADD Per Desa = ADDM + ADDP+ADDKB

ADDM : Jumlah Keseluruhan ADD Minimal

ADDP : ADD Proporsional Per Desa

ADDKB : ADD Kinerja Baik

Σ ADD Per Desa = Jumlah Keseluruhan ADD Per Desa.

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan penghitungan dan pembagian pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta pagu Siltap Kepala Desa, perangkat desa dan tunjangan BPD tiap desa.
- (2) Besaran Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Honorarium Pengelola Keuangan Desa, Honorarium Kader Posyandu, PAUD, dan Insentif unsur pendukung Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran Total Pagu ADD dan Pembagian Besaran Tahapan ADD setiap desa sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Alur Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Alur Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran ADD
Siltap dan Tunjangan BPD
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD Siltap dan Tunjangan BPD kepada Pemerintah Desa setiap bulan.
- (2) Jumlah penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari total pagu alokasi ADD Siltap dan Tunjangan BPD.
- (3) ADD Non Siltap dan Tunjangan disalurkan ke dalam 2 (dua) tahapan.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pemindahbukuan **dari** Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bulan Januari berupa:
 1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan I (kesatu) dari Kepala Desa kepada Camat;
 2. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari tingkat desa;
 3. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 4. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026;

5. keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
 6. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 7. keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
 8. keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
 9. daftar Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD;
 10. daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya;
 11. surat ijin dan surat cuti pada Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya dilampirkan;
 12. surat ijin dan surat cuti pada Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan sebelumnya dilampirkan.
 13. laporan realisasi pembayaran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
 14. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 15. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.
- b. Bulan Februari sampai dengan Desember berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari Kepala Desa kepada Camat;
 2. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari tingkat desa;
 3. laporan realisasi pembayaran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
 4. daftar Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari Pemerintah Desa;
 5. daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya;
 6. surat ijin dan surat cuti pada Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya dilampirkan;
 7. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 8. fotokopi nomor Rencana Kas Desa.
- (3) Apabila ada berkas yang berubah dikarenakan perubahan nama Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana pada ayat (2) angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) maka berkas tersebut dilampirkan.

Pasal 12

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bulan Januari berupa:

1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari Camat kepada Kepala Dinas;
2. rekomendasi Camat;
3. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari tingkat Kecamatan;
4. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari tingkat Kecamatan;
5. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari tingkat desa;
6. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026;
7. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026
8. keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
9. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
10. keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
11. keputusan tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
12. daftar Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD;
13. daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya;
14. surat ijin dan surat cuti pada Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya dilampirkan;
15. laporan realisasi pembayaran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan sebelumnya;

16. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 17. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.
- b. Bulan Februari sampai dengan bulan Desember berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari Camat kepada Kepala Dinas;
 2. rekomendasi Camat;
 3. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Pebruari dan bulan seterusnya dari tingkat Kecamatan;
 4. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari tingkat kecamatan;
 5. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari tingkat desa;
 6. laporan realisasi pembayaran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
 7. daftar Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD bulan Pebruari dan bulan seterusnya dari Pemerintah Desa;
 8. daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya;
 9. surat ijin dan surat cuti pada Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya dilampirkan;
 10. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 11. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.

Pasal 13

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bulan Januari berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari Kepala Dinas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, beserta daftar

Potongan BPJS masing-masing orang per desa dan nama-nama penerima Siltap dan Tunjangan BPD orang per Desa;

2. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan I (kesatu) dari tingkat Daerah;
 3. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Januari dari tingkat Daerah;
 4. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 5. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 6. keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
 7. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 8. keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
 9. keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
 10. daftar Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD;
 11. laporan realisasi pembayaran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
 12. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 13. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.
- b. Bulan Februari sampai dengan bulan Desember berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari Kepala Dinas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, beserta daftar Potongan BPJS masing-masing orang per desa dan nama-nama penerima siltap dan Tunjangan BPD orang per Desa;
 2. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Pebruari dan bulan seterusnya dari tingkat Daerah;
 3. lembaran Verifikasi berkas ADD Siltap dan Tunjangan BPD bulan Februari dan bulan seterusnya dari tingkat Daerah;
 4. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 5. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.

Pasal 14

- (1) Pengajuan Usulan Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD dari Pemerintah Desa disampaikan melalui aplikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyaluran pada bulan januari dan february.
- (3) Pemerintah Desa yang terlambat mengajukan usulan penyaluran ADD untuk Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka usulan tidak diproses dan Pemerintah Desa wajib mengajukan Kembali penyaluran kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas.
- (4) Keterlambatan penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD tidak akan dihitung pada tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD

Pasal 15

- (1) Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pemerintah Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I (kesatu) berupa:
 1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Kepala Desa kepada Camat;
 2. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari tingkat desa;
 3. peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 4. Peraturan kepala desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 5. keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
 6. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 7. keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
 8. keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

(PPKD) Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;

9. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 10. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.
- b. Tahap II (kedua) berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Kepala Desa kepada Camat;
 2. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari tingkat desa;
 3. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 dan atau APBDes Perubahan;
 4. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026 dan atau Peraturan Kepala Desa Perubahan Tahun Anggaran 2026;
 5. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Sebelumnya beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi Siskeudes;
 6. bukti lengkap setoran pajak yang dibiayai dari ADD, Dana Desa, DBH dan dana lainnya yang diterima desa pada tahun anggaran sebelumnya yang disertai dengan bukti pembayaran pajak;
 7. laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I (kesatu) tahun anggaran berjalan beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi Siskeudes;
 8. bukti lengkap setoran pajak dari ADD Tahap I (kesatu), Dana Desa Tahap I (kesatu), Dana Desa Tahap II (kedua), DBH Tahap I (kesatu), DBH tahap II (kedua) dan dana lainnya yang diterima desa yang disertai dengan bukti pembayaran pajak;
 9. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 10. dokumentasi Spanduk Realisasi APBDesa Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
 11. dokumentasi Spanduk APBDesa Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Apabila ada berkas yang berubah dikarenakan perubahan nama Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana pada ayat (2) angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) maka berkas tersebut dilampirkan.
- (3) Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat

Kabupaten secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I (kesatu) berupa:

1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Camat kepada Kepala Dinas;
2. rekomendasi Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Camat;
3. lembar Pengecekan Berkas Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
4. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
5. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari tingkat desa;
6. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026;
7. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026;
8. keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
9. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
10. keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
11. keputusan tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
12. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
13. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.

b. Tahap II (kedua) berupa:

1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Camat kepada Kepala Dinas;
2. rekomendasi Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Camat;
3. lembar Pengecekan Berkas Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
4. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;

5. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari tingkat desa;
 6. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 dan atau APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2026;
 7. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026 dan atau Peraturan Kepala Desa Perubahan Tahun Anggaran 2026;
 8. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Sebelumnya beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi Siskeudes;
 9. Bukti lengkap setoran pajak akhir tahun anggaran;
 10. laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I (kesatu) tahun anggaran berjalan beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi;
 11. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 12. dokumentasi Spanduk Realisasi APBDesa Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
 13. dokumentasi Spanduk APBDesa Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I (kesatu) berupa:
 - 1 surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Kepala Dinas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - 2 lembar Pengecekan Berkas Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Daerah;
 3. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Daerah;

4. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari tingkat desa;
 5. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 6. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 7. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 8. fotokopi nomor Rekening Kas Desa.
- b. Tahap II (kedua) berupa:
1. surat Pengantar berkas usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Kepala Dinas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 2. lembar Pengecekan Berkas Usulan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Daerah;
 3. berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Daerah;
 4. lembaran Verifikasi berkas ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari tingkat desa;
 5. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 dan atau APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2026;
 6. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026 dan atau Peraturan Kepala Desa Perubahan Tahun Anggaran 2026;
 7. peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Sebelumnya beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi Siskeudes;

8. bukti lengkap setoran pajak akhir tahun anggaran;
9. bukti lengkap setoran pajak ADD Tahap I (kesatu), Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah;
10. laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I (kesatu) tahun anggaran berjalan beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi;
11. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
12. dokumentasi Spanduk Realisasi APBDesa Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
13. dokumentasi Spanduk APBDesa Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Semua proses pengusulan ADD Non Siltap dan ADD Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis elektronik.
- (2) Dalam hal sistem aplikasi berbasis elektronik mengalami kendala dan tidak dapat digunakan, Bupati dapat menetapkan kebijakan terkait penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Petunjuk penggunaan aplikasi berbasis elektronik ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Penerimaan dokumen penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I (kesatu) paling lambat tanggal 15 juni 2026;
- b. Tahap II (kedua) paling lambat tanggal 20 Desember 2026; dan
- c. Dalam hal pada tahun berkenaan tidak melakukan usulan ADD, maka tidak dapat disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Maret 2026

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026 NOMOR 804

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) FORMULA DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kecamatan	Desa	ANGKA V1	RASIO V1	BOBOT V1	ANGKA V2	RASIO V2	BOBOT V2	ANGKA V3	Rasio V3	BOBOT V3	ANGKA V4	Rasio V4	BOBOT V4	BOBOT DESA (BDx)	Klasifikasi Desa	Siltap Kades, Sekdes, & Perangkat (Rp)	Tunjangan BPD	ADDVar (Rp)	ADD Per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	SEPANG	SEPANG KOTA	2019	0.02373	0.00356	62.06898	0.00684	0.00137	25.4524	0.00468	0.00141	21	0.00730	0.00256	0.0089	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	177,780,427	555,780,430
2	SEPANG	TEWAI BARU	1145	0.01346	0.00202	62.06898	0.00684	0.00137	37.0513	0.00682	0.00205	37	0.01287	0.00450	0.0099	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	198,727,229	576,727,230
3	SEPANG	TANJUNG KARITAK	1375	0.01616	0.00242	60.98005	0.00672	0.00134	32.7123	0.00602	0.00181	50	0.01739	0.00609	0.0117	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	233,218,158	611,218,160
4	SEPANG	PAMATANG LIMAU	671	0.00789	0.00118	63.15791	0.00696	0.00139	40.893	0.00753	0.00226	25	0.00870	0.00304	0.0079	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	157,518,546	535,518,550
5	SEPANG	TAMPELAS	720	0.00846	0.00127	60.98005	0.00672	0.00134	30.864	0.00568	0.00170	26	0.00904	0.00317	0.0075	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	149,647,115	527,647,110
6	SEPANG	RABAUH	669	0.00786	0.00118	60.98005	0.00672	0.00134	32.7725	0.00603	0.00181	25	0.00870	0.00304	0.0074	SWASEMBADA	279,600,000	131,400,000	147,521,477	558,521,480
7	KURUN	PETAK BAHANDANG	1356	0.01594	0.00239	63.15791	0.00696	0.00139	25.5941	0.00471	0.00141	51	0.01774	0.00621	0.0114	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	228,082,885	606,082,890
8	KURUN	TANJUNG RIU	579	0.00681	0.00102	63.15791	0.00696	0.00139	32.5293	0.00599	0.00180	59	0.02052	0.00718	0.0114	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	227,821,908	605,821,910
9	KURUN	TELUK NYATU	2740	0.03220	0.00483	95.82579	0.01056	0.00211	22.609	0.00416	0.00125	30	0.01043	0.00365	0.0118	SWAKARYA	246,600,000	178,200,000	236,853,651	661,653,650
10	KURUN	TUMBANG LAMPAHUNG	613	0.00720	0.00108	63.15791	0.00696	0.00139	47.938	0.00882	0.00265	39	0.01357	0.00475	0.0099	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	197,339,578	575,339,580
11	KURUN	TEWANG PAJANGAN	1380	0.01622	0.00243	41.37932	0.00456	0.00091	25.8563	0.00476	0.00143	37	0.01287	0.00450	0.0093	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	185,533,359	563,533,360
12	KURUN	TUMBANG TARIK	826	0.00971	0.00146	104.5372	0.01152	0.00230	25.748	0.00474	0.00142	8	0.00278	0.00097	0.0062	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	123,106,016	501,106,020
13	KURUN	TUMBANG MIWAN	1528	0.01796	0.00269	83.84756	0.00924	0.00185	34.5259	0.00635	0.00191	47	0.01635	0.00572	0.0122	SWASEMBADA	279,600,000	131,400,000	243,389,459	654,389,460
14	KURUN	HURUNG BUNUT	1306	0.01535	0.00230	10.88929	0.00120	0.00024	23.7892	0.00438	0.00131	47	0.01635	0.00572	0.0096	SWASEMBADA	279,600,000	131,400,000	191,551,851	602,551,850
15	KURUN	TUMBANG HAKAU	1309	0.01539	0.00231	29.40109	0.00324	0.00065	24.1158	0.00444	0.00133	8	0.00278	0.00097	0.0053	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	105,220,327	483,220,330
16	KURUN	PILANG MUNDUK	672	0.00790	0.00118	41.37932	0.00456	0.00091	27.5048	0.00506	0.00152	22	0.00765	0.00268	0.0063	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	125,867,761	503,867,760
17	KURUN	TUMBANG MANYANGAN	445	0.00523	0.00078	25.04538	0.00276	0.00055	56.0779	0.01032	0.00310	24	0.00835	0.00292	0.0074	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	147,085,276	525,085,280
18	KURUN	PENDA PILANG	552	0.00649	0.00097	62.06898	0.00684	0.00137	36.5347	0.00672	0.00202	11	0.00383	0.00134	0.0057	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	113,943,300	491,943,300
19	KURUN	TUMBANG TAMBIRAH	1065	0.01252	0.00188	54.44647	0.00600	0.00120	39.387	0.00725	0.00217	51	0.01774	0.00621	0.0115	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	229,213,084	607,213,080
20	TEWAH	SARERANGAN	1091	0.01282	0.00192	108.8929	0.01200	0.00240	50.8006	0.00935	0.00280	9	0.00313	0.00110	0.0082	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	164,467,758	542,467,760
21	TEWAH	TUMBANG PAJANGEI	674	0.00792	0.00119	95.82579	0.01056	0.00211	54.1688	0.00997	0.00299	8	0.00278	0.00097	0.0073	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	145,289,723	523,289,720
22	TEWAH	KASINTU	765	0.00899	0.00135	44.64611	0.00492	0.00098	46.7719	0.00861	0.00258	42	0.01461	0.00511	0.0100	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	200,557,268	578,557,270
23	TEWAH	BATU NYIWUH	1292	0.01519	0.00228	54.44647	0.00600	0.00120	38.1096	0.00701	0.00210	43	0.01496	0.00523	0.0108	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	216,328,427	594,328,430
24	TEWAH	TUMBANG HABAON	613	0.00720	0.00108	117.6044	0.01296	0.00259	47.9737	0.00883	0.00265	37	0.01287	0.00450	0.0108	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	216,505,089	594,505,090
25	TEWAH	SEI RIANG	420	0.00494	0.00074	93.64793	0.01032	0.00206	36.0037	0.00663	0.00199	34	0.01183	0.00414	0.0089	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	178,620,030	556,620,030
26	TEWAH	SANDUNG TAMBUN	1128	0.01326	0.00199	17.42287	0.00192	0.00038	45.5718	0.00839	0.00252	70	0.02435	0.00852	0.0134	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	268,207,601	646,207,600
27	TEWAH	TANJUNG UNTUNG	1070	0.01258	0.00189	127.4047	0.01404	0.00281	39.3878	0.00725	0.00217	9	0.00313	0.00110	0.0080	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	159,283,680	537,283,680
28	TEWAH	UPON BATU	652	0.00766	0.00115	101.2704	0.01116	0.00223	33.4868	0.00616	0.00185	34	0.01183	0.00414	0.0094	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	187,380,592	565,380,590
29	TEWAH	SUMUR MAS	932	0.01095	0.00164	117.6044	0.01296	0.00259	40.9679	0.00754	0.00226	4	0.00139	0.00049	0.0070	SWASEMBADA	279,600,000	131,400,000	139,669,361	550,669,360
30	TEWAH	BATU NYAPAU	684	0.00804	0.00121	26.13431	0.00288	0.00058	43.0952	0.00793	0.00238	4	0.00139	0.00049	0.0046	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	92,961,132	470,961,130
31	TEWAH	TAJA URAP	560	0.00658	0.00099	23.95645	0.00264	0.00053	39.0224	0.00718	0.00215	59	0.02052	0.00718	0.0109	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	217,044,861	595,044,860
32	TEWAH	TELUK LAWAH	964	0.01133	0.00170	34.84574	0.00384	0.00077	50.6159	0.00932	0.00279	9	0.00313	0.00110	0.0064	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	127,151,642	505,151,640
33	TEWAH	KARASON RAYA	524	0.00616	0.00092	45.73503	0.00504	0.00101	63.3947	0.01167	0.00350	10	0.00348	0.00122	0.0066	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	132,981,522	510,981,520
34	TEWAH	RANGAN MIHING	416	0.00489	0.00073	40.29039	0.00444	0.00089	51.37	0.00945	0.00284	42	0.01461	0.00511	0.0096	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	191,409,140	569,409,140

No	Kecamatan	Desa	ANGKA V1	RASIO V1	BOBOT V1	ANGKA V2	RASIO V2	BOBOT V2	ANGKA V3	Rasio V3	BOBOT V3	ANGKA V4	Rasio V4	BOBOT V4	BOBOT DESA (BDx)	Klasifikasi Desa	Siltap Kades, Sekdes, & Perangkat (Rp)	Tunjangan BPD	ADDVar (Rp)	ADD Per Desa (Rp)
35	KAHAYAN HULU UTARA	BATU TANGKUI	452	0.00531	0.00080	70.78041	0.00780	0.00156	53.6537	0.00987	0.00296	36	0.01252	0.00438	0.0097	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	194,029,044	572,029,040
36	KAHAYAN HULU UTARA	PENDA RANGAS	404	0.00475	0.00071	229.7641	0.02532	0.00506	58.4584	0.01076	0.00323	25	0.00870	0.00304	0.0120	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	240,926,798	618,926,800
50	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG SIAN	683	0.00803	0.00120	135.0272	0.01488	0.00298	41.0739	0.00756	0.00227	50	0.01739	0.00609	0.0125	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	250,685,280	628,685,280
38	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PASANGON	938	0.01102	0.00165	84.93649	0.00936	0.00187	34.6158	0.00637	0.00191	7	0.00243	0.00085	0.0063	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	125,773,816	503,773,820
39	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG KORIK	371	0.00436	0.00065	84.93649	0.00936	0.00187	59.8455	0.01101	0.00330	12	0.00417	0.00146	0.0073	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	145,814,150	523,814,150
40	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PONYOI	540	0.00635	0.00095	152.4501	0.01680	0.00336	52.6785	0.00969	0.00291	22	0.00765	0.00268	0.0099	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	197,961,756	575,961,760
41	KAHAYAN HULU UTARA	DANDANG	1379	0.01621	0.00243	158.9837	0.01752	0.00350	48.3332	0.00890	0.00267	11	0.00383	0.00134	0.0099	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	198,843,751	576,843,750
42	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG HAMPUTUNG	574	0.00675	0.00101	194.9184	0.02148	0.00430	61.7912	0.01137	0.00341	17	0.00591	0.00207	0.0108	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	215,765,665	593,765,660
43	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TANJUNGAN	555	0.00652	0.00098	129.5826	0.01428	0.00286	60.5366	0.01114	0.00334	5	0.00174	0.00061	0.0078	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	155,698,075	533,698,070
44	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TAKAOI	404	0.00475	0.00071	20.25409	0.00223	0.00045	66.3935	0.01222	0.00367	9	0.00313	0.00110	0.0059	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	118,396,931	496,396,930
45	KAHAYAN HULU UTARA	TELUK KENDURI	380	0.00447	0.00067	62.06898	0.00684	0.00137	44.8179	0.00825	0.00247	29	0.01009	0.00353	0.0080	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	160,851,014	538,851,010
46	RUNGAN	TUMBANG JUTUH	1128	0.01326	0.00199	23.95645	0.00264	0.00053	43.9387	0.00809	0.00243	51	0.01774	0.00621	0.0112	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	223,022,936	601,022,940
47	RUNGAN	TUMBANG BARINGEI	996	0.01171	0.00176	94.73686	0.01044	0.00209	41.7313	0.00768	0.00230	9	0.00313	0.00110	0.0072	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	144,864,712	522,864,710
48	RUNGAN	TUMBANG MALAHOI	1425	0.01675	0.00251	30.9818	0.00341	0.00068	38.7903	0.00714	0.00214	50	0.01739	0.00609	0.0114	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	228,471,695	606,471,690
49	RUNGAN	TUMBANG BUNUT	569	0.00669	0.00100	37.0236	0.00408	0.00082	54.2372	0.00998	0.00299	50	0.01739	0.00609	0.0109	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	218,008,452	596,008,450
50	RUNGAN	TUMBANG KAJUEI	1020	0.01199	0.00180	108.8929	0.01200	0.00240	30.9935	0.00570	0.00171	40	0.01391	0.00487	0.0108	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	215,571,356	593,571,360
51	RUNGAN	LUWUK KANTOR	238	0.00280	0.00042	67.51362	0.00744	0.00149	61.811	0.01138	0.00341	37	0.01287	0.00450	0.0098	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	196,485,783	574,485,780
52	RUNGAN	LUWUK LANGKUAS	1053	0.01238	0.00186	98.00365	0.01080	0.00216	36.7395	0.00676	0.00203	30	0.01043	0.00365	0.0097	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	193,932,730	571,932,730
53	RUNGAN	TALANGKAH	304	0.00357	0.00054	25.04538	0.00276	0.00055	54.0748	0.00995	0.00299	17	0.00591	0.00207	0.0061	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	122,858,345	500,858,350
54	RUNGAN	PAREMPEI	339	0.00398	0.00060	56.62433	0.00624	0.00125	34.1588	0.00629	0.00189	27	0.00939	0.00329	0.0070	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	140,366,271	518,366,270
55	RUNGAN	LINAU	943	0.01108	0.00166	49.00182	0.00540	0.00108	40.1834	0.00740	0.00222	24	0.00835	0.00292	0.0079	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	157,652,134	535,652,130
56	RUNGAN	BERENG BARU	455	0.00535	0.00080	33.75681	0.00372	0.00074	51.1918	0.00942	0.00283	17	0.00591	0.00207	0.0064	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	128,838,507	506,838,510
57	RUNGAN	BERENG MALAKA	543	0.00638	0.00096	44.64611	0.00492	0.00098	62.3872	0.01148	0.00344	27	0.00939	0.00329	0.0087	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	173,450,412	551,450,410
58	RUNGAN	KARYA BHAKTI	886	0.01041	0.00156	44.64611	0.00492	0.00098	33.9123	0.00624	0.00187	25	0.00870	0.00304	0.0075	SWASEMBADA	279,600,000	131,400,000	149,232,828	560,232,830
59	MANUHING	TUMBANG SEPAN	182	0.00214	0.00032	76.22506	0.00840	0.00168	56.4104	0.01038	0.00311	13	0.00452	0.00158	0.0067	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	133,952,451	511,952,450
60	MANUHING	TANGKI DAHUYAN	1057	0.01242	0.00186	203.6298	0.02244	0.00449	51.2978	0.00944	0.00283	7	0.00243	0.00085	0.0100	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	200,700,874	578,700,870
61	MANUHING	BERENG BALAWAN	308	0.00362	0.00054	6.533576	0.00072	0.00014	66.0871	0.01216	0.00365	17	0.00591	0.00207	0.0064	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	128,104,897	506,104,900
62	MANUHING	BERENG JUN	1102	0.01295	0.00194	245.0091	0.02700	0.00540	52.1513	0.00960	0.00288	24	0.00835	0.00292	0.0131	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	262,858,022	640,858,020
63	MANUHING	TAKARAS	834	0.00980	0.00147	101.2704	0.01116	0.00223	40.1033	0.00738	0.00221	35	0.01217	0.00426	0.0102	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	203,538,780	581,538,780
64	MANUHING	BELAWAN MULIA	690	0.00811	0.00122	16.33394	0.00180	0.00036	35.1207	0.00646	0.00194	17	0.00591	0.00207	0.0056	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	111,700,068	489,700,070
65	MANUHING	TARINGEN	708	0.00832	0.00125	66.42469	0.00732	0.00146	45.9528	0.00846	0.00254	8	0.00278	0.00097	0.0062	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	124,458,685	502,458,680
66	MANUHING	BANGUN SARI	555	0.00652	0.00098	11.97822	0.00132	0.00026	49.446	0.00910	0.00273	33	0.01148	0.00402	0.0080	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	159,794,949	537,794,950
67	MANUHING	FAJAR HARAPAN	1587	0.01865	0.00280	13.06715	0.00144	0.00029	39.14	0.00720	0.00216	9	0.00313	0.00110	0.0063	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	126,848,604	504,848,600
68	MANUHING	GOHONG	506	0.00595	0.00089	41.37932	0.00456	0.00091	50.5315	0.00930	0.00279	60	0.02087	0.00730	0.0119	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	237,962,651	615,962,650
69	MANUHING	TUMBANG JALEMU	520	0.00611	0.00092	47.91289	0.00528	0.00106	41.9082	0.00771	0.00231	58	0.02017	0.00706	0.0113	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	226,944,334	604,944,330
70	MIHING RAYA	TUYUN	1061	0.01247	0.00187	63.15791	0.00696	0.00139	37.6944	0.00694	0.00208	3	0.00104	0.00037	0.0057	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	114,172,845	492,172,840
71	MIHING RAYA	TUMBANG EMPAS	1323	0.01555	0.00233	62.06898	0.00684	0.00137	38.7164	0.00713	0.00214	36	0.01252	0.00438	0.0102	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	204,407,367	582,407,370
72	MIHING RAYA	RANGAN TATE	1067	0.01254	0.00188	59.89112	0.00660	0.00132	27.515	0.00506	0.00152	7	0.00243	0.00085	0.0056	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	111,443,594	489,443,590
73	MIHING RAYA	DAHIAN TAMBUK	1600	0.01881	0.00282	63.15791	0.00696	0.00139	24.8508	0.00457	0.00137	5	0.00174	0.00061	0.0062	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	123,865,602	501,865,600
74	MIHING RAYA	TUMBANG DANAU	666	0.00783	0.00117	62.06898	0.00684	0.00137	39.523	0.00727	0.00218	14	0.00487	0.00170	0.0064	SWADAYA	213,600,000	131,400,000	128,566,925	473,566,920
75	DAMANG BATU	LAWANG KANJI	657	0.00772	0.00116	198.1852	0.02184	0.00437	59.6066	0.01097	0.00329	26	0.00904	0.00317	0.0120	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	239,632,751	617,632,750
76	DAMANG BATU	TUMBANG MAHUROI	1223	0.01437	0.00216	234.1198	0.02580	0.00516	43.7957	0.00806	0.00242	23	0.00800	0.00280	0.0125	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	250,664,162	628,664,160
77	DAMANG BATU	KARETAU RAMBANGUN	234	0.00275	0.00041	161.1616	0.01776	0.00355	59.0065	0.01086	0.00326	13	0.00452	0.00158	0.0088	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	176,085,876	554,085,880
78	DAMANG BATU	KARETAU SARIAN	697	0.00819	0.00123	194.9184	0.02148	0.00430	46.4477	0.00855	0.00256	7	0.00243	0.00085	0.0089	SWADAYA	213,600,000	131,400,000	178,812,339	523,812,340
79	DAMANG BATU	TUMBANG POSU	298	0.00350	0.00053	207.9855	0.02292	0.00458	59.2846	0.01091	0.00327	12	0.00417	0.00146	0.0098	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	196,851,025	574,851,030
80	DAMANG BATU	TUMBANG MARAYA	506	0.00595	0.00089	198.1852	0.02184	0.00437	60.4832	0.01113	0.00334	23	0.00800	0.00280	0.0114	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	227,972,096	605,972,100
81	DAMANG BATU	TUMBANG ANOI	585	0.00688	0.00103	201.4519	0.02220	0.00444	44.1401	0.00812	0.00244	31	0.01078	0.00377	0.0117	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	233,629,364	611,629,360

No	Kecamatan	Desa	ANGKA V1	RASIO V1	BOBOT V1	ANGKA V2	RASIO V2	BOBOT V2	ANGKA V3	Rasio V3	BOBOT V3	ANGKA V4	Rasio V4	BOBOT V4	BOBOT DESA (BDx)	Klasifikasi Desa	Siltap Kades, Sekdes, & Perangkat (Rp)	Tunjangan BPD	ADDVar (Rp)	ADD Per Desa (Rp)
82	MIRI MANASA	TUMBANG SIRUK	149	0.00175	0.00026	15.4628	0.00170	0.00034	67.6386	0.01245	0.00373	9	0.00313	0.00110	0.0054	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	108,668,841	486,668,840
83	MIRI MANASA	MANGKUHUNG	316	0.00371	0.00056	165.5173	0.01824	0.00365	68.0327	0.01252	0.00376	5	0.00174	0.00061	0.0086	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	171,385,345	549,385,340
84	MIRI MANASA	TUMBANG MASUKIH	748	0.00879	0.00132	15.57169	0.00172	0.00034	51.1026	0.00940	0.00282	57	0.01983	0.00694	0.0114	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	228,447,931	606,447,930
85	MIRI MANASA	RANGAN HIRAN	409	0.00481	0.00072	148.0944	0.01632	0.00326	58.6368	0.01079	0.00324	3	0.00104	0.00037	0.0076	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	151,741,282	529,741,280
86	MIRI MANASA	HAROWO	208	0.00244	0.00037	235.2088	0.02592	0.00518	76.0682	0.01400	0.00420	14	0.00487	0.00170	0.0115	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	229,077,667	607,077,670
87	MIRI MANASA	TUMBANG MANYOI	353	0.00415	0.00062	106.7151	0.01176	0.00235	70.6001	0.01299	0.00390	12	0.00417	0.00146	0.0083	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	166,653,125	544,653,130
88	MIRI MANASA	TUMBANG LAPAN	390	0.00458	0.00069	174.2287	0.01920	0.00384	51.7416	0.00952	0.00286	17	0.00591	0.00207	0.0095	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	189,062,551	567,062,550
89	MIRI MANASA	BONTOI	205	0.00241	0.00036	162.2505	0.01788	0.00358	69.4532	0.01278	0.00383	10	0.00348	0.00122	0.0090	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	179,774,156	557,774,160
90	MIRI MANASA	TUMBANG KOROI	193	0.00227	0.00034	88.20328	0.00972	0.00194	75.0657	0.01381	0.00414	13	0.00452	0.00158	0.0080	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	160,218,679	538,218,680
91	MIRI MANASA	TUMBANG HATUNG	212	0.00249	0.00037	104.5372	0.01152	0.00230	72.3132	0.01331	0.00399	32	0.01113	0.00390	0.0106	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	211,308,832	589,308,830
92	RUNGAN HULU	JANGKIT	470	0.00552	0.00083	11.43376	0.00126	0.00025	55.738	0.01026	0.00308	8	0.00278	0.00097	0.0051	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	102,636,095	480,636,100
93	RUNGAN HULU	TUMBANG LAPAN	982	0.01154	0.00173	14.70055	0.00162	0.00032	43.5588	0.00802	0.00240	39	0.01357	0.00475	0.0092	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	184,158,876	562,158,880
94	RUNGAN HULU	BATU PUTER	1261	0.01482	0.00222	13.61162	0.00150	0.00030	60.7241	0.01118	0.00335	9	0.00313	0.00110	0.0070	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	139,427,090	517,427,090
95	RUNGAN HULU	SEI ANTAI	1119	0.01315	0.00197	98.00365	0.01080	0.00216	43.053	0.00792	0.00238	17	0.00591	0.00207	0.0086	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	171,579,193	549,579,190
96	RUNGAN HULU	HANTAPANG	987	0.01160	0.00174	55.5354	0.00612	0.00122	43.868	0.00807	0.00242	9	0.00313	0.00110	0.0065	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	129,629,826	507,629,830
97	RUNGAN HULU	SANGAL	519	0.00610	0.00091	28.31216	0.00312	0.00062	43.9266	0.00808	0.00243	23	0.00800	0.00280	0.0068	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	135,281,966	513,281,970
98	RUNGAN HULU	TUMBANG TUWE	343	0.00403	0.00060	49.00182	0.00540	0.00108	51.0464	0.00939	0.00282	13	0.00452	0.00158	0.0061	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	121,708,476	499,708,480
99	RUNGAN HULU	TUMBANG MUJAI	201	0.00236	0.00035	94.73686	0.01044	0.00209	59.664	0.01098	0.00329	21	0.00730	0.00256	0.0083	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	165,851,777	543,851,780
100	MAHUNING RAYA	TUMBANG SAMUI	767	0.00901	0.00135	94.73686	0.01044	0.00209	42.8403	0.00788	0.00237	23	0.00800	0.00280	0.0086	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	172,101,647	550,101,650
101	MAHUNING RAYA	TUMBANG OROI	671	0.00789	0.00118	30.49002	0.00336	0.00067	57.0867	0.01051	0.00315	53	0.01843	0.00645	0.0115	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	229,176,330	607,176,330
102	MAHUNING RAYA	LUWUK TUKAU	1168	0.01373	0.00206	162.2505	0.01788	0.00358	45.1594	0.00831	0.00249	41	0.01426	0.00499	0.0131	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	262,382,473	640,382,470
103	MAHUNING RAYA	PUTAT DUREI	534	0.00628	0.00094	47.91289	0.00528	0.00106	54.6279	0.01005	0.00302	43	0.01496	0.00523	0.0102	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	204,961,409	582,961,410
104	MAHUNING RAYA	TUMBANG MANTUHE	516	0.00606	0.00091	58.80219	0.00648	0.00130	47.5939	0.00876	0.00263	51	0.01774	0.00621	0.0110	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	220,837,143	598,837,140
105	RUNGAN BARAT	HUJUNG PATA	854	0.01004	0.00151	67.51362	0.00744	0.00149	67.5391	0.01243	0.00373	45	0.01565	0.00548	0.0122	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	244,009,324	622,009,320
106	RUNGAN BARAT	TUMBANG JALEMU KAJUEI	352	0.00414	0.00062	32.66788	0.00360	0.00072	56.9386	0.01048	0.00314	17	0.00591	0.00207	0.0066	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	131,072,476	509,072,480
107	RUNGAN BARAT	JALEMU RAYA	794	0.00933	0.00140	41.37932	0.00456	0.00091	58.3255	0.01073	0.00322	15	0.00522	0.00183	0.0074	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	147,158,607	525,158,610
108	RUNGAN BARAT	JALEMU MASULAN	376	0.00442	0.00066	37.0236	0.00408	0.00082	65.831	0.01212	0.00363	14	0.00487	0.00170	0.0068	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	136,353,103	514,353,100
109	RUNGAN BARAT	MANGKAWUK	320	0.00376	0.00056	31.83024	0.00351	0.00070	59.5752	0.01096	0.00329	11	0.00383	0.00134	0.0059	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	117,877,628	495,877,630
110	RUNGAN BARAT	TAJAH ANTANG RAYA	300	0.00353	0.00053	14.75324	0.00163	0.00033	56.0516	0.01032	0.00309	11	0.00383	0.00134	0.0053	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	105,755,420	483,755,420
111	RUNGAN BARAT	TUMBANG KUAYAN	724	0.00851	0.00128	45.73503	0.00504	0.00101	59.0325	0.01086	0.00326	30	0.01043	0.00365	0.0092	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	183,912,458	561,912,460
112	RUNGAN BARAT	TUMBANG LANGGAH	423	0.00497	0.00075	29.40109	0.00324	0.00065	42.1781	0.00776	0.00233	9	0.00313	0.00110	0.0048	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	96,359,185	474,359,180
113	RUNGAN BARAT	TUSANG RAYA	318	0.00374	0.00056	39.20146	0.00432	0.00086	68.5622	0.01262	0.00379	8	0.00278	0.00097	0.0062	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	123,674,884	501,674,880
114	RUNGAN BARAT	TUMBANG BAHANEI	600	0.00705	0.00106	28.31216	0.00312	0.00062	51.9185	0.00955	0.00287	53	0.01843	0.00645	0.0110	SWAKARYA	246,600,000	131,400,000	220,006,273	598,006,270
JUMLAH			85,082			9,076			5,434			2,875			1		28,211,400,000	15,026,400,000	20,000,000,000	63,237,800,000

Keterangan :

1. V1 = Variabel Jumlah Penduduk
2. V2 = Variabel Luas Wilayah
3. V3 = Variabel Indeks Kesulitan Geografis.
4. V4 = Variabel Jumlah Penduduk Miskin
9. Rasio V1 = Rasio Jumlah Penduduk
10. Rasio V2 = Rasio Luas Wilayah
11. Rasio V3 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis.
12. Rasio V4 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin
13. ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal ditambah selisih
14. ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional
15. ADD = Alokasi Dana Desa

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

**BESARAN INSENTIF ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS
 TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	KECAMATAN	DESA	KRITERIA UTAMA						DESA BERKINERJA BAIK		
			PERCONTOHAN DESA ANTI KORUPSI	BUMDES AKTIF DAN BERBADAN HUKUM	BUMDESA DENGAN UNIT USAHA YANG SUDAH BERJALAN	PEMERINTAH DESA YANG TELAH MENYALURKAN DANA KETAHANAN PANGAN KE BUMDESA	KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG BERBADAN HUKUM	KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG AKTIF	DESA MANDIRI	BAIK	SANGAT BAIK
(1)	(2)	(3)	(4)						(6)	(7)	(8)
1	SEPANG	SEPANG KOTA		30,000,000				30,000,000		30,000,000	
2	SEPANG	TEWAI BARU						30,000,000			
3	SEPANG	TANJUNG KARITAK						30,000,000			
4	SEPANG	PAMATANG LIMAU		30,000,000				30,000,000			
5	SEPANG	TAMPELAS						30,000,000		95,000,000	
6	SEPANG	RABAUH						30,000,000			
7	KURUN	PETAK BAHANDANG				30,000,000		30,000,000			
8	KURUN	TANJUNG RIU				30,000,000		30,000,000		95,000,000	
9	KURUN	TELUK NYATU		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			197,778,760
10	KURUN	TUMBANG LAMPAHUNG		30,000,000				30,000,000		95,000,000	
11	KURUN	TEWANG PAJANGAN		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
12	KURUN	TUMBANG TARIAK						30,000,000			
13	KURUN	TUMBANG MIWAN		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			197,778,760
14	KURUN	HURUNG BUNUT		30,000,000				30,000,000			
15	KURUN	TUMBANG HAKAU		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000			197,778,760
16	KURUN	PILANG MUNDUK						30,000,000			
17	KURUN	TUMBANG MANYANGAN						30,000,000			
18	KURUN	PENDA PILANG						30,000,000		95,000,000	
19	KURUN	TUMBANG TAMBIRAH		30,000,000				30,000,000			
20	TEWAH	SARERANGAN						30,000,000			
21	TEWAH	TUMBANG PAJANGEI		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		95,000,000	
22	TEWAH	KASINTU						30,000,000			
23	TEWAH	BATU NYIWUH						30,000,000			
24	TEWAH	TUMBANG HABAON		30,000,000				30,000,000		30,000,000	
25	TEWAH	SEI RIANG						30,000,000			
26	TEWAH	SANDUNG TAMBUN				30,000,000		30,000,000			
27	TEWAH	TANJUNG UNTUNG						30,000,000			
28	TEWAH	UPON BATU						30,000,000			

NO	KECAMATAN	DESA	KRITERIA UTAMA						DESA BERKINERJA BAIK		
			PERCONTOHAN DESA ANTI KORUPSI	BUMDES AKTIF DAN BERBADAN HUKUM	BUMDESA DENGAN UNIT USAHA YANG SUDAH BERJALAN	PEMERINTAH DESA YANG TELAH MENYALURKAN DANA KETAHANAN PANGAN KE BUMDESA	KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG BERBADAN HUKUM	KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG AKTIF	DESA MANDIRI	BAIK	SANGAT BAIK
(1)	(2)	(3)	(4)						(6)	(7)	(8)
29	TEWAH	SUMUR MAS					30,000,000				
30	TEWAH	BATU NYAPAU					30,000,000				
31	TEWAH	TAJA URAP					30,000,000				
32	TEWAH	TELUK LAWAH					30,000,000				
33	TEWAH	KARASON RAYA				30,000,000	30,000,000				197,778,760
34	TEWAH	RANGAN MIHING		30,000,000			30,000,000				
35	KAHAYAN HULU UTARA	BATU TANGKOI					30,000,000				
36	KAHAYAN HULU UTARA	PENDA RANGAS					30,000,000				
37	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG SIAN		30,000,000			30,000,000				
38	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PASANGON					30,000,000				
39	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG KORIK					30,000,000				
40	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PONYOI					30,000,000				
41	KAHAYAN HULU UTARA	DANDANG		30,000,000			30,000,000				
42	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG HAMPUTUNG					30,000,000				
43	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TANJUNGAN					30,000,000				
44	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TAKAOI		30,000,000			30,000,000				
45	KAHAYAN HULU UTARA	TELUK KENDURI					30,000,000				
46	RUNGAN	TUMBANG JUTUH		30,000,000		30,000,000	30,000,000				
47	RUNGAN	TUMBANG BARINGEI					30,000,000				
48	RUNGAN	TUMBANG MALAHOI	100,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000			95,000,000	
49	RUNGAN	TUMBANG BUNUT					30,000,000				
50	RUNGAN	TUMBANG KAJUEI					30,000,000				
51	RUNGAN	LUWUK KANTOR					30,000,000				
52	RUNGAN	LUWUK LANGKUAS		30,000,000			30,000,000				
53	RUNGAN	TALANGKAH					30,000,000				
54	RUNGAN	PAREMPEI		30,000,000			30,000,000				
55	RUNGAN	LINAU					30,000,000				
56	RUNGAN	BERENG BARU					30,000,000				
57	RUNGAN	BERENG MALAKA		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000			95,000,000	
58	RUNGAN	KARYA BHAKTI					30,000,000				
59	MANUHING	TUMBANG SEPAN		30,000,000			30,000,000				
60	MANUHING	TANGKI DAHUYAN		30,000,000			30,000,000			95,000,000	
61	MANUHING	BERENG BALAWAN		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000				
62	MANUHING	BERENG JUN		30,000,000			30,000,000				
63	MANUHING	TAKARAS		30,000,000			30,000,000				
64	MANUHING	BELAWAN MULIA		30,000,000		30,000,000	30,000,000				
65	MANUHING	TARINGEN		30,000,000			30,000,000				
66	MANUHING	BANGUN SARI		30,000,000		30,000,000	30,000,000			95,000,000	
67	MANUHING	FAJAR HARAPAN		30,000,000			30,000,000			95,000,000	
68	MANUHING	GOHONG		30,000,000			30,000,000				

NO	KECAMATAN	DESA	KRITERIA UTAMA						DESA BERKINERJA BAIK		
			PERCONTOHAN DESA ANTI KORUPSI	BUMDES AKTIF DAN BERBADAN HUKUM	BUMDESA DENGAN UNIT USAHA YANG SUDAH BERJALAN	PEMERINTAH DESA YANG TELAH MENYALURKAN DANA KETAHANAN PANGAN KE BUMDESA	KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG BERBADAN HUKUM	KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG AKTIF	DESA MANDIRI	BAIK	SANGAT BAIK
(1)	(2)	(3)	(4)					(6)	(7)	(8)	
69	MANUHING	TUMBANG JALEMU		30,000,000				30,000,000			
70	MIHING RAYA	TUYUN						30,000,000			
71	MIHING RAYA	TUMBANG EMPAS						30,000,000			
72	MIHING RAYA	RANGAN TATE						30,000,000	30,000,000	30,000,000	
73	MIHING RAYA	DAHIAN TAMBUK						30,000,000			
74	MIHING RAYA	TUMBANG DANAU		30,000,000				30,000,000		30,000,000	
75	DAMANG BATU	LAWANG KANJI						30,000,000			
76	DAMANG BATU	TUMBANG MAHUROI						30,000,000			
77	DAMANG BATU	KARETAU RAMBANGUN						30,000,000			
78	DAMANG BATU	KARETAU SARIAN						30,000,000			
79	DAMANG BATU	TUMBANG POSU						30,000,000			
80	DAMANG BATU	TUMBANG MARAYA						30,000,000			
81	DAMANG BATU	TUMBANG ANOI						30,000,000			
82	MIRI MANASA	TUMBANG SIRUK						30,000,000		95,000,000	
83	MIRI MANASA	MANGKUHUNG						30,000,000			
84	MIRI MANASA	TUMBANG MASUKIH						30,000,000			
85	MIRI MANASA	RANGAN HIRAN						30,000,000			
86	MIRI MANASA	HAROWO						30,000,000			
87	MIRI MANASA	TUMBANG MANYOI						30,000,000			
88	MIRI MANASA	TUMBANG LAPAN						30,000,000		95,000,000	
89	MIRI MANASA	BONTOI		30,000,000				30,000,000			
90	MIRI MANASA	TUMBANG KOROI		30,000,000				30,000,000			
91	MIRI MANASA	TUMBANG HATUNG						30,000,000			
92	RUNGAN HULU	JANGKIT		30,000,000			30,000,000	30,000,000			
93	RUNGAN HULU	TUMBANG LAPAN		30,000,000				30,000,000		95,000,000	
94	RUNGAN HULU	BATU PUTER		30,000,000				30,000,000			
95	RUNGAN HULU	SEI ANTAI						30,000,000			
96	RUNGAN HULU	HANTAPANG						30,000,000			
97	RUNGAN HULU	SANGAL		30,000,000				30,000,000			
98	RUNGAN HULU	TUMBANG TUWE		30,000,000				30,000,000			
99	RUNGAN HULU	TUMBANG MUJAI		30,000,000				30,000,000		95,000,000	
100	MAHUNING RAYA	TUMBANG SAMUI		30,000,000			30,000,000	30,000,000			
101	MAHUNING RAYA	TUMBANG OROI		30,000,000			30,000,000	30,000,000			197,778,760
102	MAHUNING RAYA	LUWUK TUKAU		30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000			
103	MAHUNING RAYA	PUTAT DUREI		30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000			
104	MAHUNING RAYA	TUMBANG MANTUHE		30,000,000			30,000,000	30,000,000		95,000,000	
105	RUNGAN BARAT	HUJUNG PATA					30,000,000	30,000,000		95,000,000	
106	RUNGAN BARAT	TUMBANG JALEMU KAJUEI						30,000,000			
107	RUNGAN BARAT	JALEMU RAYA						30,000,000			
108	RUNGAN BARAT	JALEMU MASULAN						30,000,000			
109	RUNGAN BARAT	MANGKAWUK						30,000,000			
110	RUNGAN BARAT	TAJAH ANTANG RAYA		30,000,000				30,000,000		95,000,000	

NO	KECAMATAN	DESA	KRITERIA UTAMA						DESA BERKINERJA BAIK		
			PERCONTOHAN DESA ANTI KORUPSI	BUMDES AKTIF DAN BERBADAN HUKUM	BUMDESA DENGAN UNIT USAHA YANG SUDAH BERJALAN	PEMERINTAH DESA YANG TELAH MENYALURKAN DANA KETAHANAN PANGAN KE BUMDESA	KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG BERBADAN HUKUM	KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG AKTIF	DESA MANDIRI	BAIK	SANGAT BAIK
(1)	(2)	(3)	(4)						(6)	(7)	(8)
111	RUNGAN BARAT	TUMBANG KUAYAN					30,000,000				

112	RUNGAN BARAT	TUMBANG LANGGAH		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000				
113	RUNGAN BARAT	TUSANG RAYA					30,000,000			95,000,000	
114	RUNGAN BARAT	TUMBANG BAHANEI					30,000,000				
JUMLAH			100,000,000	1,410,000,000	330,000,000	690,000,000	3,420,000,000	30,000,000	120,000,000	1,710,000,000	988,893,800

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN III
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

BESARAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD, HONORARIUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA, MAKSIMAL HONORARIUM DAN INSENTIF DI DESA
DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor	Jabatan	Volume	Besaran (Rp)	Jumlah (Rp)	
A	Perangkat Desa				
1	Penghasilan tetap Kepala Desa	12	Bulan	3,750,000	45,000,000
2	Tunjangan Penjabat (Pj) Kepala Desa	12	Bulan	3,750,000	45,000,000
3	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	12	Bulan	3,050,000	36,600,000
4	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	12	Bulan	2,750,000	33,000,000
5	Penghasilan Kepala Seksi	12	Bulan	2,750,000	33,000,000
6	Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa	12	Bulan	2,350,000	28,200,000
B	BPD				
1	Tunjangan Ketua BPD	12	Bulan	2,550,000	30,600,000
2	Tunjangan Wakil Ketua BPD	12	Bulan	2,350,000	28,200,000
3	Tunjangan Sekretaris BPD	12	Bulan	2,150,000	25,800,000
4	Tunjangan Anggota BPD	12	Bulan	1,950,000	23,400,000
C	Honorarium Pengelola Keuangan Desa				
1	Kepala Desa (PKPKD)	12	Bulan	500,000	6,000,000
2	Sekretaris Desa (PPKD)	12	Bulan	400,000	4,800,000
3	Kaur dan Kasi	12	Bulan	300,000	3,600,000
4	Kaur Keuangan	12	Bulan	350,000	4,200,000
D	Honorarium Kader Posyandu, PAUD dan BKB				
1	Kader Posyandu	12	Bulan	300,000	3,600,000
2	Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12	Bulan	750,000	9,000,000
3	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	12	Bulan	300,000	3,600,000
E	Insentif				
1	RT/RW	12	Bulan	300,000	3,600,000
2	Linmas	12	Bulan	300,000	3,600,000
3	Mantir Adat	12	Bulan	500,000	6,000,000
4	Petugas Pengelola Perpustakaan Desa	12	Bulan	250,000	3,000,000
5	Petugas Pengelola Suaka Potensi Sumber Daya dan Perikanan Desa	12	Bulan	250,000	3,000,000
6	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	12	Bulan	500,000	6,000,000

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN IV
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN TOTAL PAGU ALOKASI DANA DESA DAN TAHAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD Per Desa Formula (Rp)	KRITERIA UTAMA						DESA BERKINERJA BAIK		TOTAL	TAHAP I	TAHAP II	
				PERCONTOHAN DESA ANTI KORUPSI	BUMDESA AKTIF DAN BERBADAN HUKUM	BUMDESA DENGAN UNIT USAHA YANG SUDAH BERJALAN	PEMERINTAH DESA YANG TELAH MENYALURKAN DANA KETAHANAN PANGAN KE BUMDESA	KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG BERBADAN HUKUM	KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG AKTIF	DESA MANDIRI	BAIK				SANGAT BAIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (4+5+6+7+8+9+10 +11+12+13)	(15) = (14x50%)	(16) = (14x50%)
1	SEPANG	SEPANG KOTA	555,780,430		30,000,000			30,000,000		30,000,000			645,780,430	322,890,215	322,890,215
2	SEPANG	TEWAI BARU	576,727,230					30,000,000					606,727,230	303,363,615	303,363,615
3	SEPANG	TANJUNG KARITAK	611,218,160					30,000,000					641,218,160	320,609,080	320,609,080
4	SEPANG	PAMATANG LIMAU	535,518,550		30,000,000			30,000,000					595,518,550	297,759,275	297,759,275
5	SEPANG	TAMPELAS	527,647,110					30,000,000			95,000,000		652,647,110	326,323,555	326,323,555
6	SEPANG	RABAUH	558,521,480					30,000,000					588,521,480	294,260,740	294,260,740
7	KURUN	PETAK BAHANDANG	606,082,890				30,000,000	30,000,000					666,082,890	333,041,445	333,041,445
8	KURUN	TANJUNG RIU	605,821,910				30,000,000	30,000,000			95,000,000		760,821,910	380,410,955	380,410,955
9	KURUN	TELUK NYATU	661,653,650		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000				197,778,760	979,432,410	489,716,205	489,716,205
10	KURUN	TUMBANG LAMPAHUNG	575,339,580		30,000,000			30,000,000			95,000,000		730,339,580	365,169,790	365,169,790
11	KURUN	TEWANG PAJANGAN	563,533,360		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000					683,533,360	341,766,680	341,766,680
12	KURUN	TUMBANG TARIAK	501,106,020					30,000,000					531,106,020	265,553,010	265,553,010
13	KURUN	TUMBANG MIWAN	654,389,460		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000				197,778,760	972,168,220	486,084,110	486,084,110
14	KURUN	HURUNG BUNUT	602,551,850		30,000,000			30,000,000					662,551,850	331,275,925	331,275,925
15	KURUN	TUMBANG HAKAU	483,220,330		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000				197,778,760	800,999,090	400,499,545	400,499,545
16	KURUN	PILANG MUNDUK	503,867,760					30,000,000					533,867,760	266,933,880	266,933,880
17	KURUN	TUMBANG MANYANGAN	525,085,280					30,000,000					555,085,280	277,542,640	277,542,640
18	KURUN	PENDA PILANG	491,943,300					30,000,000			95,000,000		616,943,300	308,471,650	308,471,650
19	KURUN	TUMBANG TAMBIRAH	607,213,080		30,000,000			30,000,000					667,213,080	333,606,540	333,606,540
20	TEWAH	SARERANGAN	542,467,760					30,000,000					572,467,760	286,233,880	286,233,880
21	TEWAH	TUMBANG PAJANGEI	523,289,720		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000			95,000,000		738,289,720	369,144,860	369,144,860
22	TEWAH	KASINTU	578,557,270					30,000,000					608,557,270	304,278,635	304,278,635
23	TEWAH	BATU NYIWUH	594,328,430					30,000,000					624,328,430	312,164,215	312,164,215
24	TEWAH	TUMBANG HABAON	594,505,090		30,000,000			30,000,000		30,000,000			684,505,090	342,252,545	342,252,545
25	TEWAH	SEI RIANG	556,620,030					30,000,000					586,620,030	293,310,015	293,310,015
26	TEWAH	SANDUNG TAMBUN	646,207,600				30,000,000	30,000,000					706,207,600	353,103,800	353,103,800
27	TEWAH	TANJUNG UNTUNG	537,283,680					30,000,000					567,283,680	283,641,840	283,641,840
28	TEWAH	UPON BATU	565,380,590					30,000,000					595,380,590	297,690,295	297,690,295
29	TEWAH	SUMUR MAS	550,669,360					30,000,000					580,669,360	290,334,680	290,334,680
30	TEWAH	BATU NYAPAU	470,961,130					30,000,000					500,961,130	250,480,565	250,480,565
31	TEWAH	TAJA URAP	595,044,860					30,000,000					625,044,860	312,522,430	312,522,430
32	TEWAH	TELUK LAWAH	505,151,640					30,000,000					535,151,640	267,575,820	267,575,820
33	TEWAH	KARASON RAYA	510,981,520				30,000,000	30,000,000				197,778,760	768,760,280	384,380,140	384,380,140
34	TEWAH	RANGAN MIHING	569,409,140		30,000,000			30,000,000					629,409,140	314,704,570	314,704,570
35	KAHAYAN HULU UTARA	BATU TANGKUI	572,029,040					30,000,000					602,029,040	301,014,520	301,014,520
36	KAHAYAN HULU UTARA	PENDA RANGAS	618,926,800					30,000,000					648,926,800	324,463,400	324,463,400
37	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG SIAN	628,685,280		30,000,000			30,000,000					688,685,280	344,342,640	344,342,640
38	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PASANGON	503,773,820					30,000,000					533,773,820	266,886,910	266,886,910
39	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG KORIK	523,814,150					30,000,000					553,814,150	276,907,075	276,907,075
40	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PONYOI	575,961,760					30,000,000					605,961,760	302,980,880	302,980,880
41	KAHAYAN HULU UTARA	DANDANG	576,843,750		30,000,000			30,000,000					636,843,750	318,421,875	318,421,875
42	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG HAMPUTUNG	593,765,660					30,000,000					623,765,660	311,882,830	311,882,830
43	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TANJUNGAN	533,698,070					30,000,000					563,698,070	281,849,035	281,849,035
44	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TAKAOI	496,396,930		30,000,000			30,000,000					556,396,930	278,198,465	278,198,465
45	KAHAYAN HULU UTARA	TELUK KENDURI	538,851,010					30,000,000					568,851,010	284,425,505	284,425,505
46	RUNGAN	TUMBANG JUTUH	601,022,940		30,000,000		30,000,000	30,000,000					691,022,940	345,511,470	345,511,470

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD Per Desa Formula (Rp)	KRITERIA UTAMA						DESA BERKINERJA BAIK		TOTAL	TAHAP I	TAHAP II
				PERCONTOHAN N DESA ANTI KORUPSI	BUMDES AKTIF DAN BERBADAN HUKUM	BUMDESA DENGAN UNIT USAHA YANG SUDAH BERJALAN	PEMERINTAH DESA YANG TELAH MENYALURKAN DANA KETAHANAN PANGAN KE BUMDESA	KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG BERBADAN HUKUM	KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG AKTIF	DESA MANDIRI	BAIK			
47	RUNGAN	TUMBANG BARINGEI	522,864,710					30,000,000				552,864,710	276,432,355	276,432,355
48	RUNGAN	TUMBANG MALAHOI	606,471,690	100,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000			95,000,000	921,471,690	460,735,845	460,735,845
49	RUNGAN	TUMBANG BUNUT	596,008,450					30,000,000				626,008,450	313,004,225	313,004,225
50	RUNGAN	TUMBANG KAJUEI	593,571,360					30,000,000				623,571,360	311,785,680	311,785,680
51	RUNGAN	LUWUK KANTOR	574,485,780					30,000,000				604,485,780	302,242,890	302,242,890
52	RUNGAN	LUWUK LANGKUAS	571,932,730		30,000,000			30,000,000				631,932,730	315,966,365	315,966,365
53	RUNGAN	TALANGKAH	500,858,350					30,000,000				530,858,350	265,429,175	265,429,175
54	RUNGAN	PAREMPEI	518,366,270		30,000,000			30,000,000				578,366,270	289,183,135	289,183,135
55	RUNGAN	LINAU	535,652,130					30,000,000				565,652,130	282,826,065	282,826,065
56	RUNGAN	BERENG BARU	506,838,510					30,000,000				536,838,510	268,419,255	268,419,255
57	RUNGAN	BERENG MALAKA	551,450,410		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000			95,000,000	766,450,410	383,225,205	383,225,205
58	RUNGAN	KARYA BHAKTI	560,232,830					30,000,000				590,232,830	295,116,415	295,116,415
59	MANUHING	TUMBANG SEPAN	511,952,450		30,000,000			30,000,000				571,952,450	285,976,225	285,976,225
60	MANUHING	TANGKI DAHUYAN	578,700,870		30,000,000			30,000,000			95,000,000	733,700,870	366,850,435	366,850,435
61	MANUHING	BERENG BALAWAN	506,104,900		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000				626,104,900	313,052,450	313,052,450
62	MANUHING	BERENG JUN	640,858,020		30,000,000			30,000,000				700,858,020	350,429,010	350,429,010
63	MANUHING	TAKARAS	581,538,780		30,000,000			30,000,000				641,538,780	320,769,390	320,769,390
64	MANUHING	BELAWAN MULIA	489,700,070		30,000,000		30,000,000	30,000,000				579,700,070	289,850,035	289,850,035
65	MANUHING	TARINGEN	502,458,680		30,000,000			30,000,000				562,458,680	281,229,340	281,229,340
66	MANUHING	BANGUN SARI	537,794,950		30,000,000		30,000,000	30,000,000			95,000,000	722,794,950	361,397,475	361,397,475
67	MANUHING	FAJAR HARAPAN	504,848,600		30,000,000			30,000,000			95,000,000	659,848,600	329,924,300	329,924,300
68	MANUHING	GOHONG	615,962,650		30,000,000			30,000,000				675,962,650	337,981,325	337,981,325
69	MANUHING	TUMBANG JALEMU	604,944,330		30,000,000			30,000,000				664,944,330	332,472,165	332,472,165
70	MIHING RAYA	TUYUN	492,172,840					30,000,000				522,172,840	261,086,420	261,086,420
71	MIHING RAYA	TUMBANG EMPAS	582,407,370					30,000,000				612,407,370	306,203,685	306,203,685
72	MIHING RAYA	RANGAN TATE	489,443,590					30,000,000	30,000,000	30,000,000		579,443,590	289,721,795	289,721,795
73	MIHING RAYA	DAHIAN TAMBUK	501,865,600					30,000,000				531,865,600	265,932,800	265,932,800
74	MIHING RAYA	TUMBANG DANAU	473,566,920		30,000,000			30,000,000		30,000,000		563,566,920	281,783,460	281,783,460
75	DAMANG BATU	LAWANG KANJI	617,632,750					30,000,000				647,632,750	323,816,375	323,816,375
76	DAMANG BATU	TUMBANG MAHUROI	628,664,160					30,000,000				658,664,160	329,332,080	329,332,080
77	DAMANG BATU	KARETAU RAMBANGUN	554,085,880					30,000,000				584,085,880	292,042,940	292,042,940
78	DAMANG BATU	KARETAU SARIAN	523,812,340					30,000,000				553,812,340	276,906,170	276,906,170
79	DAMANG BATU	TUMBANG POSU	574,851,030					30,000,000				604,851,030	302,425,515	302,425,515
80	DAMANG BATU	TUMBANG MARAYA	605,972,100					30,000,000				635,972,100	317,986,050	317,986,050
81	DAMANG BATU	TUMBANG ANOI	611,629,360					30,000,000				641,629,360	320,814,680	320,814,680
82	MIRI MANASA	TUMBANG SIRUK	486,668,840					30,000,000			95,000,000	611,668,840	305,834,420	305,834,420
83	MIRI MANASA	MANGKUHUNG	549,385,340					30,000,000				579,385,340	289,692,670	289,692,670
84	MIRI MANASA	TUMBANG MASUKIH	606,447,930					30,000,000				636,447,930	318,223,965	318,223,965
85	MIRI MANASA	RANGAN HIRAN	529,741,280					30,000,000				559,741,280	279,870,640	279,870,640
86	MIRI MANASA	HAROWO	607,077,670					30,000,000				637,077,670	318,538,835	318,538,835
87	MIRI MANASA	TUMBANG MANYOI	544,653,130					30,000,000				574,653,130	287,326,565	287,326,565
88	MIRI MANASA	TUMBANG LAPAN	567,062,550					30,000,000			95,000,000	692,062,550	346,031,275	346,031,275
89	MIRI MANASA	BONTOI	557,774,160		30,000,000			30,000,000				617,774,160	308,887,080	308,887,080
90	MIRI MANASA	TUMBANG KOROI	538,218,680		30,000,000			30,000,000				598,218,680	299,109,340	299,109,340
91	MIRI MANASA	TUMBANG HATUNG	589,308,830					30,000,000				619,308,830	309,654,415	309,654,415
92	RUNGAN HULU	JANGKIT	480,636,100		30,000,000		30,000,000	30,000,000				570,636,100	285,318,050	285,318,050
93	RUNGAN HULU	TUMBANG LAPAN	562,158,880					30,000,000			95,000,000	717,158,880	358,579,440	358,579,440
94	RUNGAN HULU	BATU PUTER	517,427,090		30,000,000			30,000,000				577,427,090	288,713,545	288,713,545
95	RUNGAN HULU	SEI ANTAI	549,579,190					30,000,000				579,579,190	289,789,595	289,789,595
96	RUNGAN HULU	HANTAPANG	507,629,830					30,000,000				537,629,830	268,814,915	268,814,915
97	RUNGAN HULU	SANGAL	513,281,970		30,000,000			30,000,000				573,281,970	286,640,985	286,640,985
98	RUNGAN HULU	TUMBANG TUWE	499,708,480		30,000,000			30,000,000				559,708,480	279,854,240	279,854,240
99	RUNGAN HULU	TUMBANG MUJAI	543,851,780		30,000,000			30,000,000			95,000,000	698,851,780	349,425,890	349,425,890
100	MAHUNING RAYA	TUMBANG SAMUI	550,101,650		30,000,000		30,000,000	30,000,000				640,101,650	320,050,825	320,050,825
101	MAHUNING RAYA	TUMBANG OROI	607,176,330		30,000,000		30,000,000	30,000,000			197,778,760	894,955,090	447,477,545	447,477,545
102	MAHUNING RAYA	LUWUK TUKAU	640,382,470		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000				760,382,470	380,191,235	380,191,235
103	MAHUNING RAYA	PUTAT DUREI	582,961,410		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000				702,961,410	351,480,705	351,480,705
104	MAHUNING RAYA	TUMBANG MANTUHE	598,837,140		30,000,000			30,000,000			95,000,000	783,837,140	391,918,570	391,918,570
105	RUNGAN BARAT	HUJUNG PATA	622,009,320				30,000,000	30,000,000			95,000,000	777,009,320	388,504,660	388,504,660

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD Per Desa Formula (Rp)	KRITERIA UTAMA						DESA BERKINERJA BAIK		TOTAL	TAHAP I	TAHAP II	
				PERCONTOHAN DESA ANTI KORUPSI	BUMDES AKTIF DAN BERBADAN HUKUM	BUMDES DENGAN UNIT USAHA YANG SUDAH BERJALAN	PEMERINTAH DESA YANG TELAH MENYALURKAN DANA KETAHANAN PANGAN KE BUMDESA	KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG BERBADAN HUKUM	KOPERASI DESA MERAH PUTIH YANG AKTIF	DESA MANDIRI	BAIK				SANGAT BAIK
106	RUNGAN BARAT	TUMBANG JALEMU KAJUEI	509.072.480					30.000.000					539.072.480	269.536.240	269.536.240
107	RUNGAN BARAT	JALEMU RAYA	525.158.610					30.000.000					555.158.610	277.579.305	277.579.305
108	RUNGAN BARAT	JALEMU MASULAN	514.353.100					30.000.000					544.353.100	272.176.550	272.176.550
109	RUNGAN BARAT	MANGKAWUK	495.877.630					30.000.000					525.877.630	262.938.815	262.938.815
110	RUNGAN BARAT	TAJAH ANTANG RAYA	483.755.420		30.000.000			30.000.000			95.000.000		638.755.420	319.377.710	319.377.710
111	RUNGAN BARAT	TUMBANG KUAYAN	561.912.460					30.000.000					591.912.460	295.956.230	295.956.230
112	RUNGAN BARAT	TUMBANG LANGGAH	474.359.180		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000					594.359.180	297.179.590	297.179.590
113	RUNGAN BARAT	TUSANG RAYA	501.674.880					30.000.000			95.000.000		626.674.880	313.337.440	313.337.440
114	RUNGAN BARAT	TUMBANG BAHANEI	598.006.270					30.000.000					628.006.270	314.003.135	314.003.135
JUMLAH			63.237.800.000	100.000.000	1.410.000.000	330.000.000	690.000.000	3.420.000.000	30.000.000	120.000.000	1.710.000.000	988.893.800	72.036.693.800	36.018.346.900	36.018.346.900

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ALUR PENYALURAN
PENYALURAN ADD SILTAP DAN TUNJANGAN BPD



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ALUR PENYALURAN
PENYALURAN ADD NON SILTAP DAN TUNJANGAN BPD

